



DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

**Dr. H. Muhammad Suhardi, SH., MH.
Dr. Wiredarme, S.Pd., MH.**

Muhammad Suhardi dan Dr. Wiredarme, S.Pd., MH.

.....

**DESENTRALISASI ASIMETRIS
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DI INDONESIA**

.....

Dr. H. MUHAMMAD SUHARDI, SH., MH.
Dr. WIREDARME, S.Pd., MH.



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan...

Judul : Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Indonesia
Penulis : Dr. H. M. Suhardi, SH., MH. dan Dr. Wiredarme,
S.Pd., MH.
Editor : Sarkawi, SH., MH.
Layout : AlBadawi
Design Sampul : Usman Ali
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa
Ukuran Buku : 200 + xii hlm. 15 cm x 23 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)
e-mail: pustakabangsa05@gmail.com
website: www.pustakabangsa.com

alamat:

I. Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB
Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281999271122
II. Jalan Udayana Mataram-NTB
(Jln. Gili Gde No.12 Komplek Pertokoan Nusantara)
Telp. (0370) 7508536 / Mobile Phone ; +6281917431789

Cetakan Pertama : Desember 2019

ISBN: 978-623-92495-1-9

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini, yang berjudul *Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia*.

Dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) bukanlah merupakan pelimpahan wewenang biasa. Desentralisasi asimetris berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara imperik Desentralisasi asimetris merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah-daerah yang hendak memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi. Desentralisasi asimetris mencoba mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal kedalam sistim pemerintahan lokal yang khas. Dengan begitu diharapkan perlawanan terhadap pemerintah nasional dan keinginan untuk merdeka dapat diimplementasikan lewat sistem pemerintahan lokal yang spesifik seperti yang dipraktikkan di beberapa negara antara lain wilayah Quibek di Kanada, Mindanau di Philipina, Bouganville di Papua Nugini, dan Basque di Spanyol. Mereka misalnya boleh punya bendera,

bahasa, partai politik lokal dan bagi hasil sumber-sumber pendapatan yang lebih besar.

Penerapan desentralisasi asimetris bisa memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia yang terkenal dengan kemajemukannya. Idealnya kebijakan desentralisasi asimetris yang diterapkan benar-benar didasarkan atas pertimbangan dan kajian yang mendalam sehingga sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan daerah bersangkutan. Jangan sampai kebijakan yang diambil hanya didasarkan atas kondisi sesaat dan tekanan-tekanan politik.

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini, masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun isi sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis,

Ttd

Dr. H. M Suhardi, SH., MH. dan
Dr. Wiredarme, S.Pd., MH.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL-----	i
KATA PENGANTAR-----	v
DAFTAR ISI-----	vii
DAFTAR TABEL-----	xi
BAB I. PENGANTAR-----	1
BAB II. KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL YANG RELEVAN DESENTRALISASI ASIMETRIS -----	17
A. Kerangka Teoritik.-----	18
1. Teori Keadilan -----	18
2. Teori Negara Kesatuan.-----	26
3. Teori Demokrasi. -----	29
B. Kerangka Konseptual. -----	33
1. Konsep Kebijakan. -----	33
2. Konsep Desentralisasi. -----	37
3. Desentralisasi Asimetris. -----	39
4. Konsep Pemerintah. -----	46

BAB III. DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA -----	51
A. Desentralisasi Asimetris Dalam Sejarah Pemerintahan Daerah. -----	53
1. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. -----	60
2. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. -----	64
3. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Negara Indonesia Timur. -----	68
4. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah -----	70
5. Desentralisasi Asimetris dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (Disempurnakan) Penpres Nomor 5 Tahun 1960. -----	73
6. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. -----	75
7. Desentralisasi Asimetris dalam TAP MPR Sementara RI Nomor XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya Kepada Daerah. -----	76
8. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun	

1974 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. -----	77
9. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. -----	80
10. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -----	83
11. Desentralisasi Asimetris dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. -----	88
B. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. -----	97
1. Daerah Istimewa Yogyakarta. -----	98
2. DKI Jakarta. -----	102
3. Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. -----	108
4. Otonomi Khusus Provinsi Papua. -----	115
BAB IV. DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM KONSEP NKRI DAN PERBANDINGAN PELAKSANAANNYA DENGAN NEGARA LAIN -----	123
A. Hakekat Desentralisasi Asimetris di Indonesia. -----	123
1. Hubungan dalam Bidang Kewenangan. -----	127
2. Hubungan Dalam Bidang Keuangan. ---	144
B. Perbandingan Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dengan Negara Lain. -----	161
1. Republik Rakyat Cina (RRC). -----	161
2. Kanada. -----	164

3. Papua Nugini.....	166
BAB V. BENTUK PENGATURAN DESENTRALISASI ASIMETRIS YANG SESUAI DENGAN NKRI----	173
A. Bentuk Pengaturan di Bidang Kewenangan.....	176
B. Bentuk Pengaturan di Bidang Keuangan.---	180
1. Dana Bagi Hasil (DBH).....	182
2. Dana Alokasi Umum / DAU. ---	184
3. Dana Alokasi Khusus (DAK). ---	186
C. Bentuk Pengaturan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan.....	188
DAFTAR PUSTAKA -----	195
A. Buku-Buku -----	195
B. Undang- Undang.....	199
C. Internet. -----	200